



The Influence Of Government Accounting Standards (Sap) Implementation, Good Governance, And The Use Of Information Technology On The Quality Of Financial Reports At Bpkpad Binjai City

Pengaruh Penerapan Sap, Good Governance Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bpkpad Kota Binjai

Vildo Rizky Kurniadi ¹⁾; Vina Arnita ²⁾; Hendra Saputra ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾vildorizky@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Government Accounting Standards, Good Governance, Information Technology.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Studi ini bertujuan menelaah sejauh mana penerapan SAP, Good Governance, dan pemanfaatan teknologi informasi memengaruhi kualitas laporan keuangan di BPKPAD Kota Binjai. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan sampel sebanyak 80 responden yang diambil dari 189 pegawai menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen pengumpulan data meliputi observasi, kuesioner, dan studi literatur, yang kemudian diolah melalui teknik regresi linear berganda. Hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari penerapan SAP, Good Governance, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, baik secara parsial maupun simultan.

ABSTRACT

This study aims to examine the extent to which the implementation of SAP (Government Accounting Standards), Good Governance, and the utilization of information technology affect the quality of financial reports at the BPKPAD of Binjai City. A descriptive quantitative approach was used in this research, with a sample of 80 respondents taken from 189 employees using purposive sampling techniques. Data collection instruments included observation, questionnaires, and literature study, which were then processed using multiple linear regression techniques. The results of the data analysis show a positive and significant influence from the implementation of SAP, Good Governance, and information technology on the quality of financial reports, both partially and simultaneously.

PENDAHULUAN

Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah serta fungsi evaluasi pertanggungjawaban publik sangat bergantung pada kualitas laporan keuangan. Berdasarkan pandangan Farikhoh (2019), terdapat prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat, di mana laporan keuangan yang berkualitas harus menghasilkan nilai manfaat yang melampaui biaya pembuatannya. Pada sektor publik, faktor yang sangat memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, serta ketaatan pada regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, Yulita (2021) menekankan bahwa karakteristik kualitatif wajib dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah agar data yang disajikan dapat diandalkan sebagai basis pengambilan keputusan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah pusat mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab, transparan, efektif, dan efisien. Guna memastikan kualitas laporan yang dihasilkan, wajib diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Implementasi SAP ini bertujuan agar laporan keuangan pemerintah memiliki karakteristik relevan, andal, mudah dipahami, serta dapat dibandingkan. Konsistensi dalam penerapan standar ini diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Kewajaran dan keandalan laporan keuangan pada pemerintah daerah (Sari, 2021) direfleksikan melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diberikan BPK terbagi menjadi empat jenis: WTP, WDP, TW, dan TMP. Akan tetapi, temuan BPK di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah masih memiliki banyak kendala, khususnya pada pemerintah daerah di Sumatera Utara. Walaupun upaya perbaikan manajemen keuangan terutama terkait SAP, good governance, dan teknologi informasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai, penurunan capaian opini di tahun 2022 menunjukkan fakta sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pengelolaan keuangan dan aset daerah masih memiliki celah permasalahan yang memerlukan pembenahan serius.

Ketidaksesuaian dengan SAP (PP No. 71 Tahun 2010), khususnya PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap, ditemukan dalam laporan BPK terkait pengelolaan aset oleh BPKPAD Kota Binjai. Temuan krusial menyoroti 15 ruko aset daerah yang dikuasai pihak luar tanpa pencatatan inventaris yang memadai. Menurut aturan tersebut, setiap aset tetap wajib diakui dan diungkapkan dengan andal. Dampak dari kelalaian pencatatan ini adalah ketidaksesuaian nilai aset pada neraca dengan kondisi riil, sehingga menurunkan kualitas kewajaran laporan keuangan daerah (Topiksumut.id, 2025).

Masalah pengelolaan keuangan ini juga didorong oleh lemahnya pemanfaatan teknologi informasi. Ketiadaan integrasi digital dalam pendataan aset mengakibatkan informasi tidak diperbarui tepat waktu dan membuka ruang terjadinya kesalahan input data. Padahal, teknologi informasi krusial untuk mendukung prinsip good governance seperti transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dengan mengadopsi sistem informasi akuntansi berbasis teknologi yang handal, pemerintah daerah dapat meningkatkan ketepatan laporan keuangan, memperkuat pengawasan internal, dan menghindari pelanggaran ketentuan SAP di masa depan.

Di luar penerapan SAP, penggunaan teknologi informasi memegang peranan krusial dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Melalui teknologi, penyusunan laporan dapat dilakukan lebih efisien dan tepat waktu, serta menghasilkan informasi yang akurat. Oleh karena itu, adopsi teknologi informasi diyakini dapat mendongkrak kualitas laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah (Rachmawati dan Anik, 2020). Kewajiban teknis ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menekankan pentingnya kecepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Keterlambatan pelaporan bahkan dapat berisiko pada penundaan dana perimbangan. Dengan demikian, teknologi informasi merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

LANDASAN TEORI

Teori Stewardship

Teori stewardship yang digagas oleh Donaldson dan Davis (1989) didasarkan pada asumsi bahwa manusia memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, berintegritas, dan dapat dipercaya. Konsep ini terus berkembang sejalan dengan perluasan ilmu akuntansi (Frankoe et al., 2021). Dalam konteks sektor publik, Wulandari dan Fauzihardani (2022) menekankan bahwa teori ini menggambarkan situasi pejabat publik yang berfokus pada kepentingan masyarakat luas dan tujuan organisasi, alih-alih kepentingan pribadi. Dalam sektor publik, teori stewardship relevan untuk menggambarkan interaksi di mana pemerintah (steward) bekerja demi kepentingan masyarakat (principal) (Oktaliza et al., 2020). Lebih lanjut, Ardianne (2020) menjelaskan bahwa hubungan ini terbentuk atas dasar nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan yang dimiliki oleh manusia.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan didefinisikan sebagai penyajian informasi yang transparan, komprehensif, mudah dipahami, dan akurat agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah bagi penggunanya (Amin, 2019). Laporan ini bertindak sebagai dokumen final hasil dari rangkaian pencatatan data transaksi (Fachruddin et al., 2024), yang memaparkan kondisi keuangan serta aktivitas aktivitas entitas dalam periode tertentu (Arnita et al., 2021; 2023). Bagi sektor publik, laporan keuangan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud pertanggungjawaban pemerintah yang menyediakan informasi krusial (Ruqoyah, 2022). Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi prasyarat mutlak tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan (Mayasari, 2022). Sementara dalam sektor korporasi maupun perbankan, laporan keuangan berfungsi sebagai acuan utama pemangku kepentingan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja manajemen (Saputra & Fitriani, 2024; Hasibuan & Saputra, 2025). Saputri dkk. (2023) menjelaskan bahwa komponen-komponen yang membentuk laporan keuangan secara lengkap meliputi: Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Perubahan Posisi Keuangan. Tidak hanya itu, laporan tersebut harus mencakup catatan tambahan dan penjelasan materiil. Dalam hal penilaian mutu laporan, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menetapkan beberapa parameter indikator kualitas, yaitu laporan harus bersifat relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan panduan prinsip akuntansi yang wajib digunakan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintahan. SAP telah ditetapkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, yang diwujudkan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan berlandaskan pada Kerangka Konseptual



Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2025). Lebih lanjut, menurut Kementerian Keuangan (2025), SAP mencakup metodologi pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas menggunakan basis akrual, serta pencatatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas untuk pelaksanaan anggaran (APBN). Dwijayanto (2022) menekankan peran krusial SAP sebagai sistem vital dalam pembukuan negara yang menjadi basis pengambilan kebijakan ekonomi. Sementara itu, Nailurrohmah (2021) menggarisbawahi bahwa SAP wajib dijadikan pedoman karena memiliki landasan hukum yang mengikat.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 mencakup serangkaian komponen pernyataan standar sebagai indikator pengukurannya. Indikator tersebut terdiri dari PSAP No. 01 (Penyajian Laporan Keuangan), PSAP No. 02 (Laporan Realisasi Anggaran), dan PSAP No. 03 (Laporan Arus Kas). Komponen selanjutnya yang menjadi dasar indikator SAP meliputi PSAP No. 04 (Catatan Atas Laporan Keuangan), PSAP No. 05 (Akuntansi Persediaan), PSAP No. 06 (Akuntansi Investasi), serta PSAP No. 07 (Akuntansi Aset Tetap). Selain itu, terdapat indikator teknis lainnya seperti PSAP No. 08 (Akuntansi Konstruksi), PSAP No. 09 (Akuntansi Kewajiban), PSAP No. 10 (Koreksi Kesalahan), dan PSAP No. 11 (Laporan Keuangan Konsolidasian).

Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan inisiatif untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui reformasi birokrasi (Halman, 2022). Konsep ini menuntut pengambilan keputusan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (Wahyuni, 2024; Kemenkeu, 2021). Menurut Sedarmayanti (2019), *good governance* bertindak sebagai nilai fungsional dalam hubungan pemerintah-masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam penerapannya, *good governance* memiliki dua dimensi penting: menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dan memastikan aparat pemerintah bekerja secara efektif serta efisien (Haura et al., 2019). Oleh karena itu, mewujudkan tata kelola yang baik menjadi salah satu sasaran utama dalam administrasi pemerintahan (Kurniawan, 2020). Tingkat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dinilai melalui tiga pilar utama menurut Wahyuni (2024), yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Secara umum, pemanfaatan teknologi informasi mencakup seluruh rangkaian studi, rancangan, implementasi, pengembangan, dan dukungan berbasis komputer, baik dari sisi perangkat keras maupun lunak (Burhanuddin, 2021). Dalam konteks tata kelola, teknologi informasi merujuk pada penggunaan komputer dan jaringan internet untuk memproses data dan informasi secara elektronik, yang bertujuan untuk menyederhanakan pelayanan publik serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, terutama terkait data keuangan (Hadis et al., 2022). Lebih jauh, penerapan teknologi yang optimal tidak hanya memberikan efisiensi pada bidang administrasi, tetapi juga krusial bagi sektor kesehatan, industri, dan promosi (Zebua et al., 2023). Komponen pemanfaatan ini sendiri mencakup infrastruktur teknis (*hardware* dan *software*), pengguna (*useware*), sistem, serta metode yang digunakan untuk mengelola data secara bermakna, mulai dari perolehan hingga penyimpanan dan pengorganisasian informasi (Warsita, 2018). Terdapat tiga parameter utama dalam menilai pemanfaatan teknologi informasi menurut Burhanuddin (2021), yakni pengelolaan data keuangan, perangkat yang digunakan, dan aspek perawatan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif deskriptif diterapkan dalam penelitian ini untuk menganalisis data. Lokasi penelitian ditetapkan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai, yang berlokasi di Jl. Jambi No.1, Rambung Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara. Dari total populasi sebanyak 189 pegawai BPKPAD, sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, menghasilkan 80 responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Data yang digunakan berbentuk kuantitatif, yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, penyebaran kuesioner, serta studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguujian Validitas

Tabel 1 Menyajikan Hasil Penguujian Validitas

Variabel	Item Kuesioner	Koefisien Korelasi (Corrected Item-Total Correlation)	Batasan Validitas
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X1)	X1.1	0.650	0.30
	X1.2	0.565	
	X1.3	0.623	
	X1.4	0.620	
	X1.5	0.533	
	X1.6	0.535	
	X1.7	0.503	
	X1.8	0.451	
	X1.9	0.650	
	X1.10	0.565	
	X1.11	0.623	
Good Governance (X2)	X2.1	0.803	0.30
	X2.2	0.600	
	X2.3	0.491	
	X2.4	0.495	
	X2.5	0.601	
	X2.6	0.825	
	X2.7	0.790	
	X2.8	0.764	
	X2.9	0.812	
Teknologi Informasi (X3)	X3.1	0.802	0.30
	X3.2	0.475	
	X3.3	0.613	
	X3.4	0.532	
	X3.5	0.415	
	X3.6	0.401	
	X3.7	0.541	
	X3.8	0.554	
	X3.9	0.802	
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y1	0.691	0.30
	Y2	0.768	
	Y3	0.695	
	Y4	0.675	
	Y5	0.617	
	Y6	0.611	
	Y7	0.461	
	Y8	0.521	
	Y9	0.691	
	Y10	0.768	
	Y11	0.695	
	Y12	0.675	

Sumber : Penulis (2026)

Seluruh pernyataan dalam variabel penelitian SAP, Good Governance, Teknologi Informasi, dan Kualitas Laporan Keuangan terbukti valid menurut data Tabel 1. Seluruh nilai korelasi item berada di atas 0,30, yang berarti instrumen tersebut mampu mengukur indikator variabel secara akurat.

Pengujian Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen

Variabel Penelitian	Nilai Cronbach's Alpha	Jumlah Butir (N of Items)	Batas Reliabilitas
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X1)	0.781	11	0.60
Good Governance (X2)	0.864	9	0.60
Teknologi Informasi (X3)	0.744	9	0.60
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.868	12	0.60

Sumber : Penulis (2026)

Instrumen penelitian dinyatakan reliabel menurut data Tabel 4.2, ditandai dengan nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel yang berada di atas 0,60. Secara berurutan, nilai keandalan variabel X1, X2, X3, dan Y masing-masing adalah 0,781, 0,864, 0,744, dan 0,868.

Evaluasi Syarat Model Regresi

Pengujian Normalitas

Tabel 3 Pengujian Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Parameter Uji	Unstandardized Residual
N (Jumlah Sampel)	80
Mean	0.0000000
Std. Deviation	2.13925591
Test Statistic (Kolmogorov-Smirnov)	0.066
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

Sumber : Penulis (2026)

Data residual terbukti berdistribusi normal dan layak digunakan untuk tahapan regresi selanjutnya. Hal ini didasarkan pada nilai signifikansi uji Kolmogorov–Smirnov sebesar 0,200, yang mana angka tersebut menunjukkan hasil di atas 0,05.

Pengujian Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Pengujian Multikolinearitas

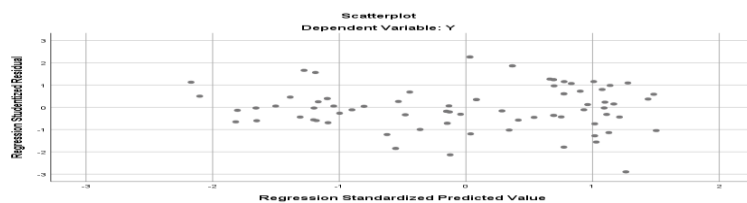
Variabel Independen	Tolerance	VIF
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0.528	1.894
Good Governance (X2)	0.328	3.053
Teknologi Informasi (X3)	0.325	3.076

Sumber : Penulis (2026)

Model regresi ini memenuhi syarat bebas dari multikolinearitas, yang berarti tidak terjadi korelasi tinggi antar variabel bebas. Parameter keberhasilan ini ditunjukkan oleh nilai VIF untuk X1, X2, dan X3 yang semuanya di bawah 10, serta nilai Tolerance yang melebihi 0,10. Dengan angka-angka tersebut, seluruh variabel independen dapat diterapkan dalam pemodelan selanjutnya tanpa mengganggu akurasi hasil.

Pengujian Heteroskedastisitas

Gambar 1 Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber : Penulis (2026)

Model regresi ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas, yang ditandai dengan tidak adanya pola sistematis pada sebaran titik-titik di grafik *scatterplot*. Sebaliknya, titik-titik data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Kondisi ini menegaskan bahwa varians residual dari model yang digunakan bersifat konstan (*homoscedasticity*), sehingga model tersebut valid untuk digunakan.

Pemodelan Regresi Linear Berganda**Tabel 5 Pemodelan Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t-hitung	Sig.
(Konstanta)	17.344	5.257	0.000
SAP (X1)	0.306	3.138	0.002
Good Governance (X2)	0.238	2.021	0.047
Teknologi Informasi (X3)	0.263	2.000	0.049

Sumber : Penulis (2026)

Data pada Tabel 5 mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan (Y) didorong secara positif oleh penerapan SAP (X1), Good Governance (X2), dan penggunaan Teknologi Informasi (X3). Jika ketiga variabel independen diabaikan (nilai nol), kualitas laporan keuangan dasar adalah sebesar 17,344 (konstanta). Variabel SAP (X1) menunjukkan kontribusi positif dan signifikan (korelasi positif 0,306; sig 0,002), dengan nilai Beta 0,323 yang menempatkannya sebagai faktor dominan dalam meningkatkan kualitas pelaporan. Selanjutnya, Good Governance (X2) juga berperan signifikan dengan koefisien 0,238 dan sig 0,047, menguatkan akuntabilitas laporan keuangan. Variabel Teknologi Informasi (X3) turut memberikan dampak signifikan (koefisien 0,263; sig 0,049) terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, di mana pengolahan data yang lebih baik berkontribusi positif.

Pengujian Parsial (Uji t)**Tabel 6 Pengujian Parsial (Uji t)**

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t-hitung	Sig.
(Konstanta)	17.344	5.257	0.000
SAP (X1)	0.306	3.138	0.002
Good Governance (X2)	0.238	2.021	0.047
Teknologi Informasi (X3)	0.263	2.000	0.049

Sumber : Penulis (2026)

- 1) Dampak Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) Berdasarkan hasil analisis, Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) mencatatkan nilai t-hitung sebesar 3,138 dengan tingkat signifikansi 0,002 ($<0,05$). Temuan ini menegaskan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang berarti penerapan SAP memiliki pengaruh positif serta signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi 0,306 mengimplikasikan bahwa peningkatan pada SAP akan diikuti oleh kenaikan kualitas laporan keuangan sebesar satuan tersebut. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan meningkat sejalan dengan perbaikan penerapan SAP.
- 2) Pengaruh Good Governance (X2) Variabel Good Governance (X2) menghasilkan nilai t-hitung sebesar 2,021 dengan tingkat signifikansi 0,047 ($<0,05$), sehingga memutuskan bahwa H_2 diterima. Hasil ini mengonfirmasi bahwa praktik tata kelola yang baik berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi sebesar 0,238 menunjukkan bahwa penguatan *good governance* secara nyata meningkatkan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan.
- 3) Kontribusi Teknologi Informasi (X3) Penggunaan Teknologi Informasi (X3) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, ditunjukkan oleh nilai t-hitung 2,000 dengan signifikansi 0,049 ($<0,05$), yang membuat H_3 diterima. Koefisien 0,263 mengindikasikan bahwa optimalisasi sistem informasi berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Dengan kata lain, semakin efektif penggunaan teknologi dalam proses pengolahan data keuangan, semakin baik hasil laporan yang disajikan.

Pengujian Simultan (Uji F)**Tabel 7 Pengujian Simultan (Uji F)**

Sumber Keragaman	Jumlah Kuadrat (Sum of Squares)	df	Rata-Rata Kuadrat (Mean Square)	F-hitung	Sig.
Regresi	1503.139	3	501.046	34.335	0.000
Residual	1109.061	76	14.593		
Total	2612.200	79			

Sumber : Penulis (2026)



Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.759 ^a	.575	.559

Sumber : Penulis (2026)

Nilai R Square 0,575 pada Tabel 8 menandakan bahwa variabel SAP, Good Governance, dan Teknologi Informasi secara bersama-sama mampu menjelaskan 57,5% variabilitas pada Kualitas Laporan Keuangan. Ini berarti mayoritas perubahan pada variabel dependen ditentukan oleh ketiga variabel bebas tersebut.

Pembahasan

Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) terhadap Mutu Laporan Keuangan (Y)

Melalui pengujian secara parsial, variabel SAP (X1) mencatatkan nilai t-hitung 3,138 dengan angka signifikansi 0,002 ($< 0,05$), yang berarti H1 diterima. Temuan ini membuktikan secara empiris bahwa efektivitas penerapan SAP berbanding lurus dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Secara teoretis, hal ini memperkuat PP No. 71 Tahun 2010 yang mendefinisikan SAP sebagai landasan prinsipil dalam pelaporan keuangan sektor publik. Selain itu, hasil ini memperkuat studi dari Tabupook & Wulandari (2024) yang menemukan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi secara signifikan mampu mendongkrak keandalan laporan keuangan di daerah Sulawesi Tengah.

1. Peran *Good Governance* (X2) dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Uji statistik menunjukkan bahwa *Good Governance* (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai t-hitung 2,021 (sig. 0,047 $< 0,05$), sehingga H2 didukung. Hasil ini mengindikasikan bahwa tata kelola yang kredibel berperan vital dalam penyajian laporan keuangan yang lebih bermutu. Selaras dengan teori Wahyuni (2024), tata kelola yang baik menjamin pengambilan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Temuan ini juga memberikan dukungan empiris terhadap penelitian Tabupook & Wulandari (2024) yang menyatakan bahwa penguatan prinsip *Good Governance* di instansi pemerintah akan berdampak pada meningkatnya akurasi informasi keuangan.

2. Kontribusi Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Variabel Teknologi Informasi (X3) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai t-hitung 2,000 (sig. 0,049 $< 0,05$), sehingga H3 dapat diterima. Optimalisasi sistem informasi dalam manajemen keuangan terbukti mempermudah proses pencatatan hingga pelaporan menjadi lebih akurat. Hal ini sesuai dengan pandangan Burhanuddin (2021) mengenai peran krusial dukungan perangkat keras dan sistem aplikasi dalam organisasi. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil studi Sari (2021) di Kabupaten Batang yang menegaskan bahwa integrasi teknologi informasi merupakan faktor penentu dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

3. Analisis Simultan SAP (X1), *Good Governance* (X2), dan Teknologi Informasi (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil uji simultan menghasilkan nilai F-hitung 34,335 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang menunjukkan bahwa model regresi ini sangat valid dan layak digunakan. Secara kolektif, penerapan SAP, praktik *Good Governance*, dan dukungan Teknologi Informasi memberikan kontribusi besar terhadap mutu laporan keuangan. Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang berkualitas harus mampu menyajikan posisi keuangan entitas secara terstruktur. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sinergi antara standar, sistem, dan tata kelola adalah kunci utama dalam mencapai transparansi pelaporan keuangan pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap mutu laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi berbasis PP No. 71 Tahun 2010 berperan krusial dalam menghasilkan laporan yang akurat, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Praktik *Good Governance* memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kualitas laporan keuangan. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, akuntabilitas, dan

kepatuhan hukum dalam tata kelola pemerintahan, maka semakin tinggi pula kualitas serta kepercayaan publik terhadap penyajian informasi keuangan daerah.

3. Penggunaan Teknologi Informasi berkontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hasil ini membuktikan bahwa efektivitas sistem informasi dalam memproses dan mengolah data keuangan berbanding lurus dengan ketepatan waktu dan keakuratan data yang disajikan.
4. Secara kolektif (simultan), SAP, Good Governance, dan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ketiga variabel tersebut merupakan faktor kunci yang saling mendukung dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Saran

1. Terkait Pengembangan Penelitian Berikutnya: Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi variabel-variabel lain yang diduga kuat memengaruhi mutu laporan keuangan, contohnya tingkat kompetensi SDM, efektivitas sistem pengendalian internal, serta tingkat komitmen organisasi. Selain itu, disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian agar cakupan hasil studi menjadi lebih komprehensif.
2. Terkait Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai: Institusi ini disarankan untuk secara konsisten meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memperkuat prinsip Good Governance, dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi yang ada. Upaya ini penting guna menjaga dan meningkatkan mutu laporan keuangan yang dihasilkan.
3. Terkait Pihak Universitas: Universitas diharapkan dapat mengembangkan kurikulum akuntansi sektor publik agar lebih aplikatif, serta mempererat jalinan kerja sama dengan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa agar lebih siap terjun ke dunia kerja pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A., Elder, Randal J., & Beasley, Mark S. (2015). *Auditing and Assurance Services*. Pearson.
- Astian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Binjai (tahun terbaru yang tersedia).
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nordiawan, Dedi., & Hertianti, Ayuningtyas. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pratama, R., & Sari, D. (2020). Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 5(2), 45–60.
- Putri, N., & Rahmawati. (2021). Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), 12–25.
- Romney, Marshall B., & Steinbart, Paul J. (2018). *Accounting Information Systems*. Pearson.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Azhar. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Winarno, Wing Wahyu. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.